

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PERPRES NO.87 TAHUN 2017 TENTANG PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER SEBAGAI BENTUK PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA DI SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 1 KOTA MATARAM

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata satu
(S1) pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram



OLEH :

SILFIAH MIULAN DARI

NIM. 116130012

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

HALAMAN PERSETUJUAN

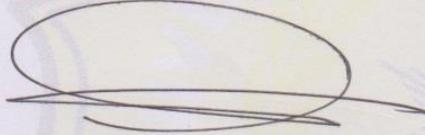
SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERPRES NO.87 TAHUN 2017 TENTANG
PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER SEBAGAI BENTUK
PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA DI SEKOLAH LUAR BIASA
NEGERI 1 KOTA MATARAM**

Telah memenuhi syarat dan disetujui

Tanggal, 13 Juli 2020

Dosen Pembimbing I,



H. Zaini Bidaya, S.H.,M.H.
NIDN. 0814065701

Dosen Pembimbing II,



Zedi Muttaqien, S.Pd.,M.Pd
NIDN. 0821128402

Menyetujui:

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Muhammadiyah Mataram

Ketua Program Studi,



Abdul Sakban, S.Pd., M.Pd.
NIDN. 0824048404

HALAMAN PENGESAHAN

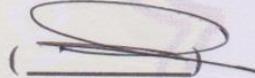
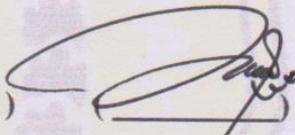
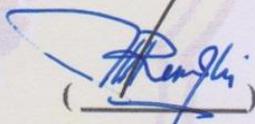
SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERPRES NO.87 TAHUN 2017 TENTANG
PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER SEBAGAI BENTUK
PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA DI SEKOLAH LUAR BIASA
NEGERI 1 KOTA MATARAM**

Skripsi atas nama Silfiah Miulan Dari telah dipertahankan didepan dosen penguji
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram

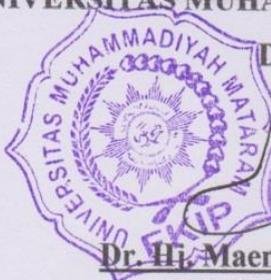
Tanggal, 06 Agustus 2020

Dosen Penguji :

1. H. Zaini Bidaya, S.H.,M.H (Ketua) 
NIDN.0814065701
2. Zedi Muttaqien, S.Pd., M.Pd (Anggota) 
NIDN.0821128402
3. Dr. Sri Rejeki, M.Pd (Anggota) 
NIP. 196612101993032002

Mengesahkan:

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

 Dekan,
Dr. Hj. Maemunah, S.Pd.,M.H
NIDN. 0802056801

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa :

Nama : Silfiah Miulan Dari

Nim : 116130012

Alamat : Dusun Sabedo 1 RT. 03 Desa Sabedo Kecamatan Utan
Kabupaten Sumbawa

Memang benar skripsi yang berjudul Implementasi Perpres No.87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Sebagai Bentuk Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Kota Mataram adalah hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik ditempat manapun.

Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain. Kecuali arahan pembimbing jika terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan, memang dijadikan acuan sebagai sumber dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Jika dikemudian hari pernyataan saya tidak benar saya siap mempertanggung jawabkannya. Termasuk bersedia meninggalkan gelar sarjana yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mataram, 13 Juli 2020

Yang membuat pernyataan



Silfiah Miulan Dari

NIM. 116130012



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SILFIAH MULAN DARI
NIM : 116130012
Tempat/Tgl Lahir : SABEDU, 09 November 1998
Program Studi : PPKn
Fakultas : FKIP
No. Hp/Email : 085 339 420 819
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta atas karya ilmiah saya berjudul:

.....
Implementasi Perpres No. 81 Tahun 2017 tentang penguatan Pendidikan Karakter sebagai Bentuk penerapan Niki-Niki Pancasila di Sekolah luar Biasa Negeri 1 kota Mataram

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 12 Agustus 2020



Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

- ❖ *Belajar Tidak akan berarti tanpa dibarengi budi pekerti*
- ❖ *Tolonglah orang walaupun kita tahu dia takkan mampu untuk menolong kita kembali*
- ❖ *Semua makhluk hebat dalam satu hal, tapi tidak dalam segala hal
(spongebob squarepants)*



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Sujud syukur kusembahkan kepadaMu ya Allah, Tuhan yang Maha Agung dan Maha Tinggi atas segala rahmat dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi yang sederhana ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal dalam mencapai cita-cita. Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi yaitu :

1. Emak dan bapak yang selalu mendo'akan yang terbaik untuk saya, terimakasih karna selalu memberikan dukungan, nasehat dan cinta kasih yang tiada terhingga.
2. Teruntuk kedua adik laki-lakiku wahyu dan habib, terimakasih karna sudah menjadi adik yang baik dan selalu memberikaan canda tawa yang tak akan bisa tergantikan.
3. Untuk keluarga serta saudara, Kakek, Nenek, Winda, Riska, Bi Tuti, Ega, dan Fauzi yang senang tiasa memberikan bantuan serta dukungan yang terbaik
4. Teman-teman seperjuangan yang telah menemani selama 4 tahun di jurusan PPKn angkatan 2016
5. Dan kampus hijau Universitas Muhammadiyah Mataram

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya yang setia menemani hingga akhir zaman.

Skripsi yang diberi judul **“Implementasi Perpres No.87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Sebagai Bentuk Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Kota Mataram”** dimana merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr.H.Arsyad Abdul Ghani, M.Pd sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Ibu Dekan Dr.Hj.Maemunah,S.Pd.,M.H sebagai Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Bapak Abdul Sakban, S.Pd., M.Pd Sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan
4. Bapak H. Zaini Bidaya, SH.,MH. sebagai Pembimbing 1 dan Bapak Zedi Muttaqien, S.Pd., M.Pd sebagai Pembimbing 2

5. Bapak dan ibu dosen yang telah membekali ilmu pengetahuan selama kuliah
6. Drs. Agung Wijayanto, M. Phil.SNE selaku Kepala SLB Negeri 1 Mataram, para guru dan seluruh warga sekolah yang telah membantu proses penelitian
7. Kerabat serta sahabat seperjuangan yang senantiasa saling mendukung sampai detik ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan dan imbalan keridhaan-Nya. Penulis menyadari skripsi ini masih banyak memiliki kekurangan, oleh karena itu segala saran dan kritik yang membangun penulis harapkan untuk kemajuan masa-masa mendatang. Akhir kata penulis harapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkompeten. Aamiin

Penulis

Silfiah Miulan Dari
116130012

Silfiah Miulan Dari. 2020. **Implementasi Perpres No.87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Sebagai Bentuk Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Kota Mataram**. Skripsi. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram.

Pembimbing I : H. Zaini Bidaya, SH., MH.

Pembimbing II : Zedi Muttaqien, S.Pd.,M.Pd

ABSTRAK

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter yang merupakan bentuk penerapan nilai pancasila yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama yang tidak hanya dilakukan di sekolah reguler tetapi termasuk untuk anak berkebutuhan khusus. Penelitian ini menggambarkan bagaimana implementasi penguatan pendidikan karakter di SLB Negeri 1 Mataram.

Metode penelitian adalah kualitatif melalui pendekatan diskriptif dengan menentukan informan secara *purposive sampling*, sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan teknik analisis melalui reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, implementasi Perpres No. 87 Tahun 2017 di SLB Negeri 1 Mataram yaitu sekolah melaksanakannya program penguatan pendidikan karakter yang terintegrasi dengan program kegiatan pembelajaran mulai dari kegiatan akademik, keterampilan, pengembangan diri, ekstrakurikuler, dan program budaya serta karakter bangsa. Kedua, hambatan yang dialami dalam implementasi yaitu (1) kurangnya keikutsertaan orang tua dalam mendukung penguatan pendidikan karakter di sekolah, (2) kurang adanyakemaksimalan dalam inovasi atau pengembangan pelaksanaan penguatan pendidikan karakter. Ketiga, solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala Implementasi Perpres No.87 Tahun 2017 ialah (1) mengadakan kerjasama dengan wali murid dan instansi masyarakat untuk penerapan program pembelajaran, (2) sekolah selalu mengevaluasi dan berusaha mengembangkan proses pembelajaran di sekolah.

Kata kunci :Perpres, Penguatan Pendidikan karakter, Nilai-nilai Pancasila

Silfiah Miulan Dari. 2020. **Implementation of Presidential Decree No.87 of 2017 concerning Strengthening Character Education as a Form of Application of Pancasila Values in SLB Negeri 1 Mataram.** Thesis. Mataram: Muhammadiyah University of Mataram.

Consultant I : H. Zaini Bidaya, S.H., M.H.
Consultant II : Zedi Muttaqien, S.Pd., M.Pd

ABSTRACT

Based on Presidential Regulation No. 87 of 2017 the strengthening the Character Education is a form of Pancasila values application that aims to improve the quality of national education, which places character education as the leading soul not only carried out in regular schools but also for children with special needs. This study describes how the implementation of character education in State Special School / SLB Negeri 1 Mataram.

The research method used was descriptive through a qualitative approach by determining sampled purposively. The data source consisted of primary and secondary data. Data collection techniques used were observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques were through data reduction, data display, and concluding.

The results showed that first, the implementation of Presidential Decree No. 87 of 2017 at SLB Negeri 1 Mataram is the school implements a character education strengthening program by integrating it with learning activities starting from academic activities, skills, self-development, extracurricular activities, and cultural programs and national character. Second, the obstacles found in the implementation are (1) lack of parental participation in supporting character education in schools, (2) lack of maximization in innovation or development of strengthening character education implementation. Third, the solution taken to overcome the obstacles in implementing Presidential Decree No.87 of 2017 is (1) collaborating with parents and community agencies to implement learning programs, (2) schools always evaluate and try to develop the learning process at schools.

Keywords: Presidential Decree, Strengthening character education, Pancasila values

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM

An KEPALA
LABORATORIUM BAHASA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Moh. Fauzi Bafadal,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Yang Relevan	8
2.2 Pengertian Implementasi	11
2.3 Kajian Umum Peraturan Presiden	12
2.3.1 Proses Rancangan Peraturan Presiden.....	12
2.3.2 Materi Dan Fungsi Peraturan Presiden.....	13
2.3.3 Penguatan Pendidikan Karakter	14

2.3.4 Prinsip, Tujuan, Nilai Utama, Basis Gerakan, dan - Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter	16
2.4 Pendidikan Karakter.....	25
2.5 Bentuk Penerapan Nilai-Nilai Pancasila	28
2.6 Anak Berkebutuhan Khusus	32
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian	36
3.2 Lokasi Penelitian.....	37
3.3 Subjek Penelitian.....	37
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.5 Jenis dan Sumber Data	40
3.6 Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN	
4.1 Diskripsi Hasil Penelitian.....	44
4.1.1 Gambaran Umum Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Mataram	44
4.1.1.1 Identitas Sekolah.....	45
4.1.1.2 Visi dan Misi Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Mataram....	45
4.1.1.3 Keadaan Peserta Didik.....	46
4.1.1.4 Daftar Guru dan Pegawai di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Mataram	47
4.1.2 Penyajian Data Penelitian	48
4.2 Pembahasan.....	56
4.2.1 Program kegiatan apa yang dilakukan oleh Sekolah Luar	

Biasa Negeri Pembina Kota Mataram dalam mengimplementasikan Perpres No.87 Tahun 2017 di SLB Negeri 1 Kota Mataram.....	56
4.2.2 Hambatan-hambatan apa saja yang dialami dalam pengimplementasian Perpres No.87 Tahun 2017 di SLB Negeri 1 Kota Mataram.....	62
4.2.3 Apa saja solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala Implementasi Perpres No.87 Tahun 2017 di SLB Negeri 1 Kota Mataram.....	63
BAB V KESIMPULAN	
5.1 Kesimpulan.....	66
5.2 Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Table 1. Identitas Sekolah.....	45
Tabel 2. Daftar Guru SLB Negeri 1 Mataram.....	47



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan usaha sadar secara sistematis untuk mencetak seseorang menjadi generasi yang berkualitas dan memiliki daya saing, karenanya pemerintah telah menjamin hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan, dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang di perlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Maka dari itu pendidikan pada umumnya sangat penting diberikan pada seluruh kalangan masyarakat secara menyeluruh karena dengan pendidikan yang baik akan berimplikasi pada pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berkarakter.

Melihat kondisi sekarang ini dan akan datang, ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berkarakter merupakan kebutuhan fundamental yang wajib diberikan kepada masyarakat secara *holistic*, baik itu dari golongan terpelajar maupun non terpelajar. karena melihat di era teknologi saat ini memunculkan berbagai persoalan moral, budi pekerti, watak atau karakter seperti: meningkatnya dekadensi moral, meningkatnya ketidak jujuran pelajar, dan masih tingginya kasus tindakan kekerasan yang terjadi antar pelajar seperti *bullying* dan tawuran serta berbagai fenomena lain yang menunjukkan bahwa nilai-

nilai pancasila pada generasi penerus bangsa memudar. Salah satu cara memperbaiki kemerosotan moral dan nilai-nilai pancasila saat ini yaitu melakukan revolusi karakter bangsa atau revolusi mental.

Melihat kondisi seperti ini pemerintah mulai menata sistem pendidikan di Indonesia dengan memunculkan pendidikan karakter dalam semua jenjang pendidikan. Menurut Albertus pendidikan karakter adalah di berikannya tempat bagi kebebasan individu dalam menghayati nilai-nilai yang dianggap baik, luhur, dan layak di perjuangkan sebagai pedoman bertingkah laku bagi kehidupan pribadi berhadapan dengan dirinya, sesama dan Tuhan (Albertus, 2010:5).

Pendidikan Karakter sebenarnya bukanlah hal sebuah kebijakan baru dalam dunia pendidikan, namun sejauh ini dalam pelaksanaannya masih kurang optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor mulai dari penyusunan kebijakan program pendidikan karakter yang tidak berjalan dengan baik, kualitas sarana dan prasarana, kualitas dari tenaga pendidik, dan lain sebagainya.

Berdasarkan fenomena diatas maka pada tanggal 06 September 2017, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Dalam Perpres No.87 Tahun 2017 tersebut dijelaskan bahwa Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) merupakan gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

Didalam Perpres tersebut menunjukkan keyakinan pemerintah untuk mendukung pendidikan karakter yang telah dirancang melalui kurikulum 2013. Dalam Perpres memuat beberapa tujuan dari PPK, yaitu membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter serta mengembangkan *platform* pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, maka pendidikan karakter bangsa harus di berikan pada semua peserta didik disekolah, termasuk anak berkebutuhan khusus yang notabennya anak non normal yang juga berhak untuk mendapatkan pendidikan layaknya anak-anak normal, karenanyagerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) tidak hanya dilaksanakan pada sekolah leguler (SD/SMP/SMA/SMK) tetapi juga dilaksanakan di Sekolah Luar Biasa (SLB)/Sekolah Khusus (SKh)/Sekolah Inklusi dimana di sekolah-sekolah tersebut peserta didiknya menyandang kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial atau yang sering disebut Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

Bagi Anak berkebutuhan khusus, pendidikan dilakukan dengan pelayanan secara khusus, yang berbeda dengan anak pada umumnya karena mengalami hambatan dalam belajar dan perkembangan sehingga begitu rentannya dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (2018) bahwa

anak berkebutuhan khusus masuk kedalam 15 kelompok anak yang rentan mengalami kekerasan. Bentuk-bentuk kekerasan yang rentan dialami pun sangat beragam seperti, kekerasan fisik, psikis, hingga hambatan-hambatan sosial seperti pelabelan negatif dan diskriminasi (www.kemenpppa.go.id).

Anak berkebutuhan pada umumnya bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. SLB bagian A untuk anak tunanetra, SLB bagian B untuk anak tunarungu, SLB bagian C untuk anak tunagrahita, SLB bagian D untuk anak tunadaksa, SLB bagian E untuk anak tunalaras dan SLB bagian G untuk cacat ganda. (Pramartha, 2012:7).

Model pendidikan khusus seperti pendidikan luar biasa dengan bentuk sekolah bernama Sekolah Luar Biasa (SLB) yang berbeda dengan sekolah-sekolah pada umumnya wajib membekali peserta didiknya dengan karakter positif yang kuat sesuai dengan kadar kemampuan peserta didik. Karakter yang kuat peserta didik anak berkebutuhan khusus (ABK) dapat menghindarkan peserta didik dari kekerasan fisik/ psikis dan meningkatkan kepercayaan diri ABK yang pada akhirnya akan melahirkan optimisme untuk menjalankan kehidupan, walaupun dirinya berbeda dengan anak-anak pada umumnya. SLB Negeri 1 Kota Mataram merupakan salah satu sekolah luar biasa yang diperuntukkan bagi anak berkebutuhan khusus, yang terletak di jalan Adi Sucipto No. 42 Ampenan Mataram, kelurahan Pejarakan Karya Kecamatan Ampenan Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat yang didirikan tahun 2005.

Dari observasi awal, SLB Negeri 1 Kota Mataram telah ditunjuk oleh pemerintah sebagai sekolah rintisan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa,

kewirausahaan dan ekonomi kreatif dengan pendekatan belajar aktif untuk membangun daya saing dan karakter bangsa dari tahun 2010 sampai tahun 2014 sehingga SLB Negeri 1 Kota Mataram telah memiliki pengalaman dalam memberikan pembinaan karakter kepada peserta didiknya dan telah mulai melaksanakan program baru yaitu penguatan pendidikan karakter sehingga nantinya peserta didik juga mampu menjadi manusia yang religius, mandiri, trampil, peduli, bertanggung jawab, berjiwa sosial sehingga dapat diterima dimasyarakat, dan dapat menjadi generasi emas Indonesia Tahun 2045 dengan jiwa pancasila dan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan. Dengan demikian SLB Negeri 1 Kota Mataram mempunyai tanggung jawab yang lebih berat di banding sekolah pada umumnya karena pengimplementasian penguatan pendidikan karakter di SLB tidak dapat dilakukan sama dengan sekolah leguler lainnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Perpres No.87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter sebagai bentuk penerapan nilai-nilai pancasila di SLB Negeri 1 Kota Mataram.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat di identifikasi sebagai berikut:

1. Program kegiatan apa yang dilakukan oleh Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Kota Mataram dalam mengimplementasikan Perpres No.87 Tahun 2017 di SLB Negeri 1 Kota Mataram ?

2. Hambatan-hambatan apa saja yang dialami dalam pengimplementasian Perpres No.87 Tahun 2017 di SLB Negeri 1 Kota Mataram ?
3. Apa saja solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala Implementasi Perpres No.87 Tahun 2017 di SLB Negeri 1 Kota Mataram ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendiskripsikan program kegiatan sekolah dalam mengimplementasikan Perpres No.87 Tahun 2017 di SLB Negeri 1 Kota Mataram
2. Untuk mendiskripsikan hambatan yang dihadapi dalam pengimplementasian Perpres No.87 Tahun 2017 di SLB Negeri 1 Kota Mataram
3. Untuk mendiskripsikan solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala pengimplementasian Perpres No.87 Tahun 2017 di SLB Negeri 1 Kota Mataram

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian ini antara lain:

- a. Teoritis
 1. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pendidikan karakter
 2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang mengkaji masalah-masalah yang berkaitan

dengan Perpres No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter

b. Praktis

1. Penelitian ini diharapkan agar penulis sebagai peneliti bisa menambah wawasan mengenai program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) sebagai bentuk penerapan nilai-nilai pancasila di Sekolah Luar Biasa (SLB) 1 Kota Mataram
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan pendidikan di Indonesia, terutama bagi pendidikan khusus atau Sekolah Luar Biasa (SLB)
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penelitian yang sejenis dan bacaan yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan khususnya mengenai Pengaruh implementasi Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) sebagai bentuk penerapan nilai-nilai pancasila di SLB 1 Kota Mataram

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Yang Relevan

2.1.1 “Implementasi Program Penguatan Pendidikan (PPK) melalui Kegiatan 5S di Sekolah Dasar Negeri Karanganyar Gunung 01 Semarang” oleh Desy Nurlaida Khotimah dari Universitas PGRI Semarang tahun 2019.

Tujuan penelitian ini ialah mendeskripsikan implementasi program penguatan karakter peserta didik dengan cara menerapkan budaya 5 S (senyum, salam, sapa, sopan, dan santun), adapun hasil dan kesimpulan dari penelitian ini yaitu perencanaan program PPK dilaksanakan setiap awal tahun pembelajaran. Proses perencanaan program PPK diawali dengan pembentukan tim pengembangan program di sekolah. Setelah terbentuk maka dilakukan identifikasi berbagai potensi yang ada di sekolah, kemudian proses sosialisasi ke berbagai pihak.

Langkah selanjutnya yaitu merumuskan visi dan misi sekolah yang sesuai dengan program PPK. Kemudian mendesain dan merumuskan berbagai program sekolah yang sesuai dengan nilai keutamaan lokal (nilai karakter) yang telah ditetapkan. Kegiatan 5S dapat memberi pengaruh yang berbeda terhadap karakter peserta didik. Peserta didik lebih mampu menghargai guru dan teman di sekitarnya dengan adanya program 5S ini. Cara penerapannya sangat sederhana sekali namun dampaknya sangat luar biasa bagi peserta didik. (<https://jurnal.umk.ac.id>).

Adapun kesamaan dan perbedaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif dan sama-sama membahas tentang Implementasi penguatan pendidikan karakter sehingga menjadi acuan dalam dalam penelitian ini dan perbedaannya yaitu tentang objek penelitian dimana peneliti membahas tentang implementasi penguatan pendidikan sebagai bentuk penerapan nilai-nilai pancasila sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Desy Nurlaida membahas tentang implementasi penguatan pendidikan karakter melalui kegiatan 5S (senyum, salam, sapa, sopan, dan santun)

2.1.2“Implementasi Program Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Pembiasaan Dalam Peningkatan Mutu Sekolah” oleh Silvy Eka Andiarini, Imron, dan Arifin Ahmad Nurabadi dari Universitas Negeri Malang tahun 2018

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) peran warga sekolah, (4) faktor pendukung (5) faktor penghambat dan (6) solusi dalam program penguatan pendidikan karakter melalui kegiatan pembiasaan dalam peningkatan mutu sekolah di SMPN 1 Wlingi Blitar. Adapun hasil dan kesimpulan penelitian ini yaitu (1) tahap perencanaan dimulai dari SKL sampai sosialisasi, (2) tahap pelaksanaan diterapkan dalam dua basis: kelas dan sekolah, (3) peran warga sekolah sebagai pengawas, pembina dan pelaksana. (4) faktor pendukung dan penghambat ialah pada peserta didik, guru, fasilitas serta keterlibatan pihak komite sekolah dan orang tua (<http://journalz.im.ac.id>)

Penelitian ini memiliki persamaan yang diantaranya sama-sama membahas mengenai implementasi penguatan pendidikan karakter namun dengan perbedaan bahwa dalam penelitian yang dilakukan oleh Silvy dkk melalui kegiatan pembiasaan dalam meningkatkan mutu sekolah sedangkan yang dilakukan peneliti dalam skripsi ini yaitu mendiskripsikan implementasi penguatan pendidikan karakter sebagai bentuk penerapan nilai pancasila di SLB.

2.1.3 “Penguatan Karakter Dalam Pendidikan Sistem Persekolahan (Implementasi Perpres No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter)” oleh Siti Musawwamah dan Taufiqurrahman dari Institut Agama Islam Negeri Madura.

Tujuan penelitian ini adalah mengeksplorasi pelaksanaan PPK pada sistem persekolahan di SMA Negeri di Kabupaten Pamekasan. Dan adapun hasil serta kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu pelaksanaan program PPK di SMAN 1 Pamekasan, di bawah koordinasi kepala sekolah guru-guru merealisasikannya dalam proses/kegiatan yang terintegrasi dengan masing-masing mata pelajaran, sebagaimana amanat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang memayunginya. Dapat dipastikan bahwa pelaksanaan program PPK terintegrasi dengan seluruh atau masing-masing materi pembelajaran yang diaktualisasikan dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Sehingga dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan program PPK di SMAN 1 diintegrasikan dengan beragam kegiatan intrakurikuler, kegiatan kokurikuler, dan kegiatan ekstrakurikuler (<http://ejournal.stainpamekasan.ac.id>).

Persamaan antara penelitian ini dengan yang dilakukan oleh Siti Musawwamah dan Taufiqurrahman yaitu membahas pengimplementasian penguatan pendidikan karakter dengan metode penelitian kualitatif namun perbedaannya yaitu terletak pada tujuan penelitian yang membahas tentang penguatan karakter dalam pendidikan sistem persekolahan sementara penelitian dalam skripsi ini ialah penguatan pendidikan karakter sebagai bentuk penerapan nilai-nilai pancasila.

2.2 Pengertian Implementasi

Implementasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesai (KBBI) diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Implementasi biasanya dilakukan setelah adanya perencanaan yang sudah dianggap sempurna. Menurut Usman (2002:70) Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Adapun menurut Muhammad Joko Susila (Fathurrohman & Sulistyorini, 2012:189) bahwa implementasi merupakan suatu penerapan ide konsep, kebijakan" atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, ketrampilan, maupun nilai dan sikap.

Fathurrohman & Sulistyorini (2012:190) mengatakan implementasi (pelaksanaan) merupakan proses operasional yang mengelola sumber daya selama tindakan, memerlukan ketrampilan, memotivasi dan kepemimpinan yang khusus serta memerlukan koordinasi diantara banyak orang.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat dikemukakan bahwa implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci untuk mencapai tujuan kegiatan.

2.3 Kajian Umum Peraturan Presiden No.87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter

Sebagaimana tercantum dalam UU RI No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan pasal 1 angka (6) menjelaskan bahwa peraturan presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

Definisi pasal 1 angka (6) UU No. 12 Tahun 2011 mencakup dua hal yang penting yaitu: (1) untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi , atau (2) dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah.

2.3.1 Proses Rancangan Peraturan Presiden

Tata cara penyusunan rancangan Peraturan Presiden adalah sama dengan penyusunan rancangan peraturan pemerintah dengan kata lain tata cara mulai dari perencanaan (rancangan), pembahasan, pengesahan, dan penetapan yang pada akhirnya pengundangan peraturan yang bersangkutan. Dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan tahap perencanaan peraturan Presiden dilakukan dalam suatu program penyusunan peraturan Preseden yang memuat daftar judul dan pokok materi muatan rancangan peraturan Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya

yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan kemudian perencanaan penyusunan Peraturan Presiden ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Setelah tahap perencanaan, maka akan dilakukan penyusunan peraturan Presiden yang di mana pada tahap ini, pemrakarsa membentuk panitia antarkementerian atau antarnonkementerian. Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsep penyusunan rancangan peraturan Presiden di koordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, kemudian disahkan oleh Presiden dan di undang-undangan yang dilaksanakan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan yang nantinya akan dimuat dalam berita Negara

2.3.2 Materi dan Fungsi Peraturan Presiden

Menurut Pasal 13 UU No. 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa materi yang dimuat dalam Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah atau pun materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Karenanya Peraturan Presiden di bentuk untuk menyelenggarakan peraturan lebih lanjut perintah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya.

Kemudian hal ini pula diatur dalam Perpres No.87 Tahun 2014, pasal 64 yang menjelaskan bahwa pemrakarsa menyusun Rancangan Peraturan Presiden yang berisi materi :

- a) Yang diperintah oleh Undang-Undang
- b) Untuk melaksanakan peraturan pemerintah
- c) Untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

Indrati (2007: 223-225) menyebutkan beberapa fungsi peraturan Presiden yaitu:

1. Menyelenggarakan peraturan secara umum dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan (atribusi)
2. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam peraturan pemerintah yang tegas-tegas menyebutnya (delegasi) dan
3. Menyelenggarakan peraturan lebih lanjut ketentuan lain dalam peraturan pemerintah, meskipun tidak tegas-tegas menyebutnya.

Jadi dari penjelasan diatas, maka peraturan Presiden atau di singkat dengan Perpres merupakan peraturan Perundang-undangan yang di buat oleh Presiden berisikan materi yang di perintahkan oleh Undang-undang.

2.3.3Penguatan Pendidikan Karakter

Setelah menjadi bagian komponen dalam kurikulum 2013 revisi, penguatan pendidikan karakter semakin mendapat legalitas karena dalam hal ini pemerintah telah menunjukkan perhatiannya dengan mengeluarkan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017 yang di tetapkan secara resmi oleh Presiden pada tanggal 6 September 2017. Hal ini merupakan upaya serius pemerintah untuk merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi berbagai elemen dalam ekosistem pendidikan. Selain pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik, Perpres No.

87 Tahun 2017 juga menyasar kelompok masyarakat, dan lingkungan keluarga sebagai pendidik utama dan pertama.

Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

Dalam upaya pengolahan karakter pada olah hati (etik) yaitu individu yang memiliki kerohanian mendalam, beriman dan bertakwa, pada olah rasa (estetis) yaitu individu yang memiliki integritas moral, rasa berkesenian dan berkebudayaan, kemudian pada olah pikir (literasi) yaitu individu yang memiliki keunggulan akademis sebagai hasil pembelajaran dan pembelajar sepanjang hayat, sedangkan olah raga (kinestetik) yaitu individu yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif sebagai warga Negara. (Anggraini, 2018: 21).

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) merupakan amanat yang terdapat dalam Nawa Cita yang dicanangkan Presiden. Nawa Cita tersebut tertuang pada butir ke delapan yaitu tentang mengadakan revolusi karakter. PPK juga menyangkut kepribadian atau akhlak siswa. Dapat dipahami bagaimana Presiden memiliki perhatian dengan pendidikan karakter karena generasi sekarang adalah generasi emas yang 30 tahun mendatang akan menjadi pemimpin. Jadi, dengan karakter yang kuat dan bagus, dapat dipastikan kepemimpinan mendatang akan dipastikan hebat. (Khotimah, 2019:29)

Gerakan PPK menempatkan pendidikan karakter sebagai poros pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah. Kedepan diharapkan PPK agar dapat

mengintegrasikan, memperdalam, memperluas dan menyelaraskan program kegiatan pendidikan karakter.

2.3.4 Prinsip, Tujuan, Nilai Utama, Basis Gerakan, dan Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter

2.3.4.1 Prinsip-Prinsip Pengembangan dan Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter

Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dikembangkan dan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut (Nurhayati & Widyaiswara, 2017: 173-175) :

a. Nilai-nilai Moral Universal.

Gerakan PPK berfokus pada penguatan nilai-nilai moral universal yang prinsip-prinsipnya dapat didukung oleh segenap individu dari berbagai macam latar belakang agama, keyakinan, kepercayaan, sosial, dan budaya.

b. Holistik

Gerakan PPK dilaksanakan secara holistik, dalam arti pengembangan fisik (olah raga), intelektual (olah pikir), estetika (olah rasa), etika dan spiritual (olah hati) dilakukan secara utuh-menyeluruh dan serentak.

c. Terintegrasi

Gerakan PPK sebagai poros pelaksanaan pendidikan nasional terutama pendidikan dasar dan menengah dikembangkan dan dilaksanakan dengan memadukan, menghubungkan, dan mengutuhkan berbagai elemen pendidikan.

d. Partisipatif

Gerakan PPK diterapkan dengan mengikutsertakan dan melibatkan publik seluas-luasnya sebagai pemangku kepentingan pendidikan sebagai pelaksana Gerakan PPK. Kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, komite sekolah, dan pihak-pihak lain yang terkait dapat menyepakati prioritas nilai-nilai utama karakter dan kekhasan sekolah yang diperjuangkan dalam program PPK, menyepakati bentuk dan strategi pelaksanaan PPK, bahkan pembiayaan PPK.

e. Kearifan Lokal

Gerakan PPK bertumpu dan responsif pada kearifan lokal nusantara yang demikian beragam dan majemuk agar kontekstual dan membumi. Gerakan PPK perlu mengembangkan dan memperkuat kearifan lokal nusantara agar terus berkembang dan berdaulat sehingga dapat memberi identitas dan jati diri peserta didik sebagai bangsa Indonesia.

f. Kecakapan Abad 21

Gerakan PPK mengembangkan kecakapan-kecakapan yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk hidup pada abad 21, antara lain kecakapan berpikir kritis, berpikir kreatif, kecakapan berkomunikasi, termasuk penguasaan bahasa internasional, dan kerja sama dalam pembelajaran.

g. Adil dan Inklusif

Gerakan PPK dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, non-diskriminasi, non-sektarian, menghargai

kebinekaan dan perbedaan (inklusif), dan menjunjung harkat dan martabat manusia.

h. Selaras dengan Perkembangan Peserta Didik

Gerakan PPK dikembangkan dan diterapkan selaras dengan perkembangan peserta didik baik perkembangan secara biologis, psikologis, maupun sosial, agar tingkat kecocokannya tinggi dan maksimal. Dalam hubungan ini kebutuhan-kebutuhan perkembangan peserta didik perlu memperoleh perhatian intensif.

i. Terukur

Gerakan PPK dikembangkan dan dilaksanakan berlandaskan prinsip keterukuran agar dapat dimati dan diketahui proses dan hasilnya secara objektif. Dalam hubungan ini komunitas sekolah mendeskripsikan nilai-nilai utama karakter yang menjadi prioritas pengembangan di sekolah dalam sebuah sikap dan perilaku yang dapat diamati dan diukur secara objektif, mengembangkan program-program penguatan nilai-nilai karakter bangsa yang mungkin dilaksanakan oleh sekolah, dan mendorong sumber daya yang dapat disediakan oleh sekolah dan pemangku kepentingan pendidikan.

2.3.4.2 Tujuan Penguatan Pendidikan Karakter

PPK merupakan lanjutan dari program sebelumnya yang memberikan solusi terhadap turunnya moral anak bangsa, karena menurut Kemendikbud (2017) salah satu urgensi PPK adalah “Keterampilan abad 21 yang dibutuhkan siswa guna mewujudkan keunggulan bersaing Generasi Emas 2045: Kualitas Karakter,

Literasi Dasar, Kompetensi 4 C (*Critical Thinking an Problem Solving, Creativity, Communication Skills, dan Ability to Work Collaboratively*)” (Andiarini ddk, 2018:239).

Penguatan pendidikan karakter sebagai sebuah kebijakan dalam bidang pendidikan yang bertugas menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggungjawab. Sebagaimana tertera dalam Pasal 2 Perpres No. 87 Tahun 2017 bahwa tujuan dari penguatan pendidikan karakter yaitu:

- a. Membangun dan membekali Peserta Didik sebagai generasi emas Indonesia Tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan
- b. Mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi Peserta Didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia
- c. Merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, Peserta Didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK.

Mendikbut (2017 : 9) kembali memperjelas apa yang menjadi tujuan gerakan penguatan pendidikan karakter (PPK) yaitu sebagai berikut:

- a. Membangun dan membekali Generasi Emas Indonesia 2045 menghadapi dinamika perubahan dimasa depan dengan keterampilan abad 21
- b. Mengembangkan platforma pendidikan nasional yang meletakkan makna dan nilai karakter sebagai jiwa atau generator utama penyelenggaraan

pendidikan, dengan memperhatikan kondisi keberagaman satuan pendidikan diseluruh wilayah Indonesia

- c. Mengembalikan pendidikan karakter sebagai ruh dan fondasi pendidikan dengan harmonisasi olah hati (etik), olah rasa (estetik), olah pikir (literasi), dan olah raga (kinestetik) melalui integrasi kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan nonkurikuler
- d. Merevitalisasi dan memperkuat kapasitas ekosistem pendidikan (kepala sekolah, guru, pengawas dan komite sekolah) untuk mendukung perluasan implementasi pendidikan karakter
- e. Membangun jejaring pelibatan publik sebagai sumber-sumber belajar di dalam dan di luar sekolah
- f. Melestarikan kebudayaan dan jati diri bangsa Indonesia dalam mendukung Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)

Jadi berdasarkan penjelasan tersebut program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) bertujuan membentuk sikap sosial generasi bangsa dalam menghadapi dinamika perubahan yang terjadi dari berbagai bidang kehidupan yang disebabkan karena era globalisasi saat ini dengan penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai alat pembentuk karakter agar manusia itu memiliki karakter yang berbudi luhur. Melalui penguatan karakter generasi muda dapat memiliki keunggulan dalam persaingan global abad 21 dengan lima nilai karakter utama yakni religius, nasionalis, integritas, gotong royong dan mandiri. Selain itu, melalui PPK pemerintah ikut mendorong peningkatan literasi dasar, kompetensi berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi generasi muda.

2.3.4.3 Nilai-nilai Utama Penguatan Pendidikan Karakter

Tujuan adanya program PPK merupakan salah satu bentuk menanamkan nilai-nilai pembentukan karakter bangsa secara masif dan efektif melalui implementasi nilai-nilai utama Gerakan Nasional Revolusi Mental. Nilai-nilai utama yang menjadi prioritas Penguatan Pendidikan (PPK) sebagaimana yang terdapat dalam Kemendikbud 2017 sebagai berikut :

a. Religius

Nilai religius berhubungan dengan keagamaan yang mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nilai keagamaan merupakan pengetahuan mendasar yang berupa ajaran-ajaran bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, yang meliputi pikiran, keyakinan, akhlak, dan segala sesuatu yang berorientasi kepada implementasi dalam kehidupan. Tiap anak diharapkan dapat saling menghargai perbedaan agama, menjunjung tinggi sikap toleran, hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama yang lain.

b. Nasionalisme

Nilai karakter nasionalisme diajarkan pada anak-anak untuk belajar menempatkan kepentingan bangsa dan Negara diatas kepentingan diri dan kelompoknya. Nilai karakter nasionalisme merupakan cara berpikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan sikap kesetiaan, mengapresiasi, menjaga, mengembangkan kekayaan budaya bangsa sendiri (kebijaksanaan, keutamaan, tradisi, nilai-nilai, pola pikir, mentalitas, karya budaya), kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap

bangsa serta mampu mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain sehingga semakin memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Sub nilai karakter nasionalis itu sendiri yaitu ; cinta tanah air, semangat kebangsaan, menghargai kebhinnekaan, rela berkorban ,dan taat akan hukum.

c. Gotong royong

Nilai karakter gotong royong mencerminkan tindakan saling menghargai semangat kerja sama dan bahu membahu dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi bersama. Menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi bantuan atau pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan. Sub nilai karakter gotong royong: kerjasama, solidaritas, kekeluargaan, aktif dalam gerakan komunitas, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

d. Integritas

Nilai karakter integritas yaitu menyelaraskan pikiran, perkataan dan perbuatan yang merepresentasikan perilaku bermoral yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Poin yang satu ini yang merupakan upaya menjadikan anak-anak menjadi orang yang dapat di percaya dalam perkataan, perbuatan, dan pekerjaan. Sub nilai karakter integritas; kejujuran, keteladanan, tanggungjawab, antikorupsi, komitmen moral, cinta pada kebenaran.

e. Mandiri

Nilai karakter mandiri merupakan sikap dan perilaku tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, pikiran dan waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi dan cita-cita. Sub nilai karakter mandiri yaitu; kerja keras (etos kerja), kreatif, inovatif, disiplin, tangguh, dan pembelajar sepanjang hayat. Skema pengembangan nilai-nilai karakter pada program PPK dapat dilihat pada gambar 2.1

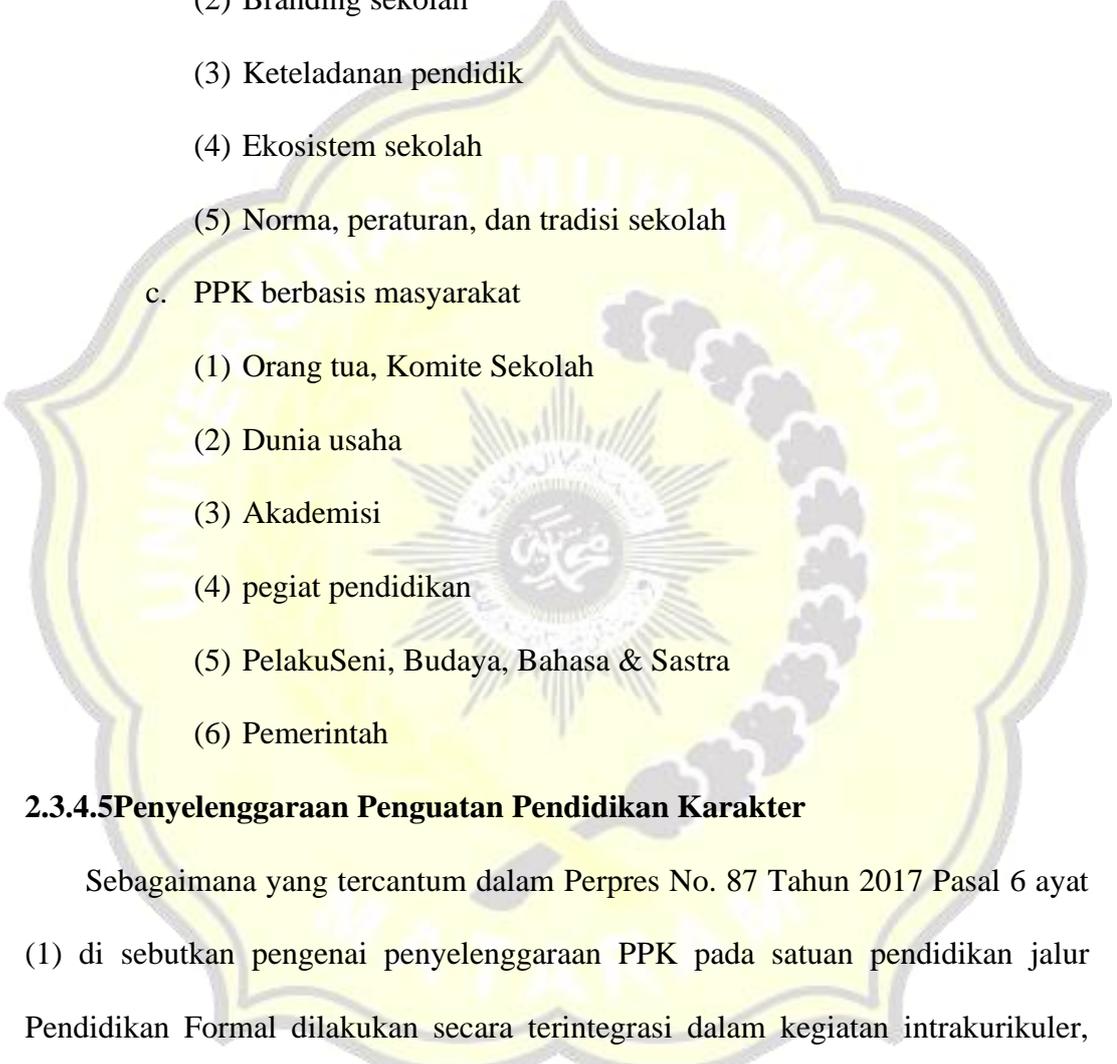


Sumber: Tim PPK Kemendikbud

2.3.4.4 Basis Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter

Dalam pelaksanaan program Penguatan Pendidikan Karakter melalui beberapa pendekatan dilakukan oleh sekolah, menurut Kemendikbud (2017: 20) dalam pelaksanaan PPK dapat dilaksanakan dengan berbasis kurikulum yang ada yaitu :

- a. PPK berbasis kelas
 - (1) Integrasi dalam mata pelajaran

- 
- (2) Optimalisasi muatan lokal
 - (3) Manajemen kelas
 - b. PPK berbasis budaya sekolah
 - (1) Pembiasaan nilai-nilai dalam keseharian sekolah
 - (2) Branding sekolah
 - (3) Keteladanan pendidik
 - (4) Ekosistem sekolah
 - (5) Norma, peraturan, dan tradisi sekolah
 - c. PPK berbasis masyarakat
 - (1) Orang tua, Komite Sekolah
 - (2) Dunia usaha
 - (3) Akademisi
 - (4) pegiat pendidikan
 - (5) Pelaku Seni, Budaya, Bahasa & Sastra
 - (6) Pemerintah

2.3.4.5 Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter

Sebagaimana yang tercantum dalam Perpres No. 87 Tahun 2017 Pasal 6 ayat (1) di sebutkan mengenai penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan jalur Pendidikan Formal dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan intrakurikuler, Kokurikuler, dan Ekstrakurikuler. Dalam Perpres tersebut dijelaskan bahwa yang di maksud dengan kegiatan intrakurikuler, Kokurikuler, dan Ekstrakurikuler dalam Pasal 7 yaitu :

- a. Penyelenggaraan PPK dalam kegiatan Intrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan penguatan nilai-nilai

karakter melalui kegiatan penguatan materi pembelajaran, metode pembelajaran sesuai dengan muatan kurikulum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Penyelenggaraan PPK dalam kegiatan Kokurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan penguatan nilai-nilai karakter yang dilaksanakan untuk pendalaman dan/ atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler sesuai muatan kurikulum.
- c. Penyelenggaraan PPK dalam kegiatan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan penguatan nilai-nilai karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian Peserta Didik secara optimal.

2.4 Pendidikan Karakter

Pendidikan merupakan hal terpenting dalam kehidupan manusia karena melalui pendidikan, manusia dapat memahami apa yang ia butuhkan serta mampu mengatasi masalah-masalah yang terjadi saat ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pendidikan berasal dari kata dasar didik (mendidik), yaitu memelihara dan memberi (ajaran, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan fikiran. Sedangkan pendidikan yaitu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan proses, perubahan, cara mendidik. Ki Hadjar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran secara jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya (Nurkholis, 2013: 26).

Menurut Acetylena (2018:8) pendidikan adalah proses penyesuaian diri secara timbal balik antara manusia dengan alam, dengan sesama manusia, atau juga pengembangan dan penyempurnaan secara teratur dari semua potensi. Sementara itu, dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional N0.20 Tahun

2003 Pendidikan Nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokrasi serta bertanggung jawab.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka disimpulkan bahwa pendidikan merupakan upaya menuntut anak sejak lahir untuk mencapai kedewasaan jasmani dan rohani, dalam interaksi alam beserta lingkungannya.

Sedangkan karakter menurut bahasa (etimologis), istilah karakter berasal dari bahasa Latin *kharakter, kharassaein*, dan *kharax*, dalam bahasa Yunani *character* dari kata *charassein*, yang berarti membuat tajam dan membuat dalam. Dalam bahasa Inggris *character* dan dalam bahasa Indonesia sering digunakan dengan istilah karakter. Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional kata karakter berarti sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain, atau bermakna bahwa hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, watak. Maka istilah berkarakter artinya memiliki karakter, memiliki kepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak (Gunawan, 2017:1-2)

Adapun menurut Samrin (2016:13) karakter adalah keperibadian ditinjau dari titik tolak etis atau moral. Sedangkan Simon Philips (Gunawan, 2017:2) karakter adalah kumpulan data nilai yang menuju pada suatu sistem, yang melandasi pikiran, sikap dan perilaku, yang ditampilkan. Dan menurut Salahudin & Irwanto (2013: 42) karakter adalah nilai-nilai khas baik (tahu nilai kebaikan, mau berbuat baik, nyata berkehidupan baik, dan berdampak baik terhadap lingkungan) yang terpatrit dalam diri dan terwujud dalam perilaku.

Sementara itu, menurut Sani & Kadri (2016: 7) pendidikan karakter berkaitan erat dengan moral dan kepribadian, yang merupakan upaya mendidik dengan

memberikan motivasi kepada anak untuk belajar dan mengikuti ketentuan tata tertip (norma dan aturan) yang telah menjadi kesepakatan bersama.

Pendidikan karakter di pahami sebagai upaya penanaman kecerdasan dalam berpikir, penghayatan dalam bentuk sikap, dan pengamalan dalam bentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang menjadi jati dirinya, diwujudkan dalam interaksi dengan Tuhannya, diri sendiri, antarsesama, dan lingkungannya (Zubaedi, 2012: 17)

Menurut Sukro Muhab dalam Salahudin & Irawan (2013:45) pendidikan karakter memiliki dua nilai substansial yaitu:

1. Upaya berencana untuk membantu orang yang memahami, peduli dan bertindak atas nilai-nilai etika/moral;
2. Mengajarkan kebiasaan berpikir dan berbuat yang membantu orang hidup dan bekerja bersama-sama sebagai keluarga, teman, tetangga, masyarakat dan bangsa.

Berdasarkan pendapat diatas maka pendidikan karakter mempunyai makna lebih tinggi karena bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah, lebih dari itu pendidikan karakter menanamkan kebiasaan tentang hal yang baik sehingga peserta didik lebih paham tentang mana yang baik dan salah, mampu merasakan nilai yang baik dan bisa terus menerus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

2.5 Bentuk Penerapan Nilai-Nilai Pancasila

2.5.1 Nilai-Nilai Pancasila

Nilai menurut Fraenkel dalam Kartawisastra (1980:1) adalah standar tingkah laku, keindahan, keadilan, kebenaran dan efisiensi yang mengikat manusia dan sepatutnya dijalankan dan dipertahankan (Lubis, 2011:17). Sedangkan menurut Kaelan (2010: 87) nilai adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Didalam nilai terkandung cita-cita, harapan-harapan, dambaan-dambaan dan keharusan.

Pengertian nilai menurut Milton Roceah dan James Bank dalam Kartawisastra (1980:1) adalah suatu tipe kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup sistem kepercayaan, dimana seseorang harus bertindak atau menghindari suatu tindakan, atau mengenai suatu yang pantas atau tidak pantas dikerjakan, dimiliki atau dipercayai. (Lubis, 2011:16)

Berdasarkan pengertian diatas, bisa disimpulkan bahwa nilai merupakan esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti dalam kehidupan manusia. Sedangkan pancasila secara etimologis berasal dari bahasa Sansekerta, yang terdiri dari dua suku kata *Panca* yaitu lima dan *Sila* yaitu dasar, berarti pancasila merupakan lima dasar.

Kedudukan pokok Pancasila bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sebagai dasar Negara. Pernyataan demikian berdasarkan UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut : “maka disusunlah Kemerekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradap, Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,

serta dengan mewujudkan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Nilai yang ada dalam pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Kelima nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang mengacu pada tujuan yang satu. Adapun nilai-nilai dalam sila pancasila sebagai berikut (Aminullah, 2018:621) :

- a) Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama ini adalah dimana kita sebagai manusia yang diciptakan wajib menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya.
- b) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, sila kedua ini menjelaskan bahwa kita sesama manusia mempunyai derajat yang sama di hadapan hukum.
- c) Persatuan Indonesia, makna persatuan hakikatnya adalah satu, yang artinya bulat tidak terpecah.
- d) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dalam sila ini menjelaskan tentang demokrasi, adanya kebersamaan dalam mengambil keputusan dan penanganannya, dan kejujuran bersama.
- e) Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, makna dalam sila ini adalah adanya kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat, seluruh kekayaan dan sebagainya dipergunakan untuk kebahagiaan bersama, dan melindungi yang lemah.

2.5.2 Bentuk Penerapan Nilai-Nilai Pancasila

Penerapan atau penanaman nilai-nilai setiap butir pancasila harus diajarkan agar individu memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan karakter luhur bangsa dan tidak menyimpang dari nilai pancasila yang sesuai dengan sila-sila dalam pancasila yaitu sebagai berikut (Chotamiah, 2014:12-14) :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
 - a. selalu tertib dalam melaksanakan ibadah
 - b. tidak berbohong pada kepada orang tua, guru maupun teman
 - c. senantiasa bersyukur pada Tuhan karena memiliki keluarga yang menyeyanginya

- d. tidak meniru jawaban teman ketika ulangan ataupun mengerjakan tugas
 - e. toleransi dengan teman yang berlainan agama dalam beribadah
 - f. menceritakan suatu kejadian berdasarkan sesuatu yang di ketahuinya tidak ditambah-tambah ataupun dikurangi
 - g. percaya pada kemampuan sendiri dalam melakukan pekerjaan karena Allah sudah memberikan kelebihan dan kekurangan pada setiap manusia
2. kemanusiaan yang adil dan beradap
- a. Menolong orang yang sedang kesusahan
 - b. Tidak membeda-bedakan dalam berteman
 - c. Berbagi makanan dengan orang lain
 - d. Sedia mengajari teman yang belum paham dalam belajar
 - e. Memberikan tempat duduk kepada orang tua, ibu hamil, atau orang yang lebih membutuhkan
 - f. Tidak memaki-maki orang lain yang bersalah kepada kita
 - g. Selalu meminta maaf atau memaafkan apabila melakukan kesalahan
 - h. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru
3. Persatuan Indonesia
- a. Mengikuti upacara bendera dengan tertib
 - b. Berkerja sama dalam membersihkan lingkungan sekolah
 - c. Tidak berkelahi sesama teman maupun dengan orang lain

- d. Cinta produk-produk dalam negeri
 - e. Menghargai setiap orang yang berbeda ras dan budayanya
 - f. Bangga menjadi warga negara Indonesia
 - g. Mengagumi keunggulan geografis dan kesuburan tanah wilayah Indonesia
4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan
- a. Bermusyawarah dengan teman-teman dalam menyelesaikan permasalahan
 - b. Berpartisipasi dalam pemilihan
 - c. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
 - d. Menerima kekalahan dengan ikhlas apabila kalah bersaing dengan teman lain
 - e. Menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah bersama
 - f. Berani mengkritik teman, ketua maupun guru yang bertindak semena-mena
 - g. Berani mengemukakan pendapat di depan umum
 - h. Melaksanakan segala aturan dan keputusan bersama dengan ikhlas dan bertanggung jawab
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
- a. Bersikap adil kepada siapapun
 - b. Berbagi makanan dengan sama rata

- c. Seorang ketua memberikan tugas yang merata dan sesuai dengan kemampuan anggotanya
- d. Seorang guru memberikan pujian kepada siswa yang rajin dan memberi nasihat kepada siswa yang malas
- e. Tidak pilih-pilih dalam berteman
- f. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum
- g. suka bekerja keras dan menghargai hak orang lain

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai Pancasila yang luhur dapat dijadikan pedoman hidup dalam berbangsa dan berbegara. Penanaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila sangat penting dan diperlukan dalam membentuk kepribadian generasi bangsa yang berkarakter dan bermoral serta mampu bersaing dalam segala bidang baik masa sekarang maupun dimasa depan.

2.6 Anak Berkebutuhan Khusus

2.6.1 Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus

Menurut Utina 2014 (dalam Riadin dkk, 2017:22) mengemukakan definisi anak berkebutuhan khusus, yaitu anak yang mengalami gangguan fisik, mental, inteligensi, dan emosi sehingga membutuhkan pembelajaran secara khusus.

Menurut (Direktorat pendidikan luar biasa, 2004:5) anak berkebutuhan Khusus (ABK) adalah anak yang secara signifikan (bermakna) mengalami kelainan atau penyimpangan (fisik, mental, intelektual, sosial, emosional) dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain

seusiannya. Sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus untuk mengembangkan bakatnya.

Sedangkan menurut Krik dan Gallagher (dalam Muljono Abdurrachman dan Sudjadi S, 1996:9) menjelaskan hawa anak dikategorikan berkebutuhan khusus bila menyimpang dari rata-rata atau normal dalam hal kemampuan sensoris, karkarakteristik neuromotor, perilaku sosial, kemampuan dalam berkomunikasi atau gabungan dari berbagai aspek tersebut (Sudana, 2015:1). Istila lain anak berkebutuhan khusus adalah tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, *cerebral palsy*, tunalaras, autisme, CIBI (cerdas istimewa bakat istimewa) tunaganda dan berkesulitan belajar.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam proses tumbuh kembangnya mengalami kelainan atau tidak normal baik dari segi fisik, mental, intelektual, sosial dan emosional sehingga menghambat perkembangan atau berbeda dengan anak-anak normal lain yang seusia.

2.6.2 Jenis dan Krakteristik Anak Berkebutuhan Khusus

Anak berkebutuhan khusus umumnya bersekolah di sekolah luar biasa yang menyediakan pelayanan khusus atau pendidikan khusus yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Anak berkebutuhan khusus ini kemudia di sebut sebagai siswa berkebutuhan khusus. Pendidikan khusus atau yang sering dikenal sebagai pendidikan luar biasa merupakan intruksi yang di disain khusus untuk memenuhi kebutuhan siswa berkebutuhan khusus dengan tujuan utamanya adalah untuk menemukan dan menitikberatkan kemampuan siswa berkebutuhan khusus. Adapun

jenis dan karakteristik anak berkebutuhan khusus menurut Shanty (2015 : 27)

yaitu :

a. Tunagrahita

American association on mental deficiency (AAMD) dalam B3PTKSM mendefinisikan retardasi mental/tunagrahita sebagaikelainan yang meliputi fungsi intelektual umum di bawah rata-rata (*sub-average*) yaitu IQ 84 ke bawah, sehingga mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugas, menjalani hubungan sosial serta komunikasi.

b. Tunalaras

Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan control sosial. Individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya.

c. Tunarungu-wicara

Tunarungu merupakan individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen, sehingga tidak dapat menggunakan alat pendengarannya dengan baik.

d. Tunanetra

Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunatetra dapat di klasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total (*blind*) dan *low vision*.

e. Autis

Mayoritas gangguan autisme disebabkan karena abnormalitas di otak yang biasanya ditandai dengan kognisi sosial, kemampuan sosial, dan interaksi sosial.

f. Tunadaksa

Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang bawaan, sakit, atau akibat kecelakaan, termasuk *celebral palsy*, amputasi, polio, dan lumpuh.

g. Tunaganda

Istilah ini digunakan untuk menyebut anak-anak yang mengalami cacat ganda atau lebih dari satu.

h. Anak berbakat

Istilah *gifted* digunakan untuk menyebut anak-anak berbakat dengan IQ diatas 135 dengan kreativitas, motivasi dan ketahanan kerja yang tinggi.

i. hiperaktif

Bukan merupakan penyakit tetapi suatu gejala atau *symptoms*. Anak yang mengalami hiperaktif mengalami masalah dalam memfokuskan perhatian, mengatur tingkat aktivitas, dan perilaku penghambat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian dapat didefinisikan sebagai penelaahan terkendali yang mengandung dua hal pokok yaitu logika berpikir dan data atau informasi yang dikumpulkan secara *empiris* (Sudjana, 2001:03). Dapat pula dikatakan bahwa penelitian adalah kegiatan yang dilakukan secara sistimatis melalui proses pengumpulan data, pengelolaan data, serta menarik kesimpulan berdasarkan data menggunakan metode dan teknik tertentu.

Adapun metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian. Ada beberapa jenis metode dalam melakukan penelitian yaitu:

1. Metode kuantitatif Sugiyono (2016:13) dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu atau dengan kata lain penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka.
2. Metode kualitatif menurut Sugiyono (2014:1) adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi

Pada penelitian kualitatif terdapat beberapa pendekatan yang digunakan, pendekatan tersebut yaitu pendekatan deskriptif. Menurut Nazir (1988)

pendekatan diskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Ahli lain menegaskan bahwa penelitian diskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala, atau keadaan (Prastowo, 2016: 186).

Ditinjau dari rumusan masalah, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan diskriptif tentang Implementasi Perpres No 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter sebagai bentuk penerapan nilai-nilai pancasila di Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Kota Mataram

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Kota Mataram. SLB Negeri 1 terletak di jalan Adi Sucipto No. 42 Ampenan Mataram, kelurahan Pejarakan Karya Kecamatan Ampenan Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat. SLB Negeri 1 Kota Mataram merupakan salah satu sekolah yang di peruntukan bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di Kota Mataram.

3.3 Subjek Penelitian

Pada penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley (dalam Sugiyono 2014 : 49) di namakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berintraksi secara senergis.

Sugiyono (2014: 50) mengungkapkan dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu yang hasil kajiannya tidak akan di berlakukan ke populasi. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan dengan istilah responden tetapi sebagai narasumber atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian, selain itu sampel juga bukan di sebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis. subjek penelitian dalam metode penelitian kualitatif ini dilakukan secara *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan memperhatikan tujuan atau pertimbangan tertentu dengan artian informan yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Subjek penelitian harus ditentukan berdasarkan orang yang paling tahu tentang informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

Jadi peneliti menentukan subjek penelitian berdasarkan tujuan yang akan diteliti tentang implementasi Perpres No.87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter sebagai bentuk penerapan nilai-nilai pancasila di SLB Negeri 1 Kota Mataram. Maka, subjek penelitiannya yaitu Kepala Sekolah, guru kelas, waka kurikulum, dan waka kesiswaan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2014:62). Untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Sutrisno Hadi (1987) (dalam Prastowo 2016 : 220) menerangkan bahwa observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistimatis terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati dan mencatat setiap proses program pengimplemntasian Perpres No. 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter yang dilakukan di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Kota Mataram.

2. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan pertemuan dua orang yang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2014:72). Dalam penelitian ini, menggunakan wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara, yaitu wawancara yang digunakan berpegang pada pedoman pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Didalam pedoman wawancara telah tersusun secara sistimatis terkait hal-hal yang akan ditanyakan oleh peneliti.

3. Dokumentasi

Dokumen dapat dipahami sebagai setiap catatan tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa masa lalu, baik yang dipersiapkan maupun tidak dipersiapkan untuk suatu penelitian (Ghony & Fauzan, 2016:199).Dokumentasi ialah metode pengumpulan data kualitatif yang

merupakan sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data tersebut berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cendramata, jurnal kegiatan, dan sebagainya. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengungkap data yang bersumber dari dokumen dan arsip yang terdapat di SLB Negeri 1 Kota Mataram.

3.5 Jenis dan Sumber Data

3.5.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang merupakan data yang diperoleh dalam sebuah penelitian yang bukan berbentuk angka. Data ini biasanya berisi analisa kondisi saat ini pada organisasi sehingga membantu peneliti dalam menentukan permasalahan, yang tergolong data kualitatif seperti data wawancara, data observasi, catatan-catatan dari permasalahan yang pernah dihadapi, dan lain-lain sebagainya.

3.5.2 Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data yaitu para pihak yang dijadikan informan penelitian. Sumber data ini meliputi informasi dan keterangan mengenai implementasi Perpres No.87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter sebagai bentuk penerapan nilai-nilai pancasila.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan berbagai teori dan informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya. Yaitu berbagai buku yang berisi teori atau dokumen mengenai pengimplementasian Perpres No.87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter sebagai bentuk penerapan nilai-nilai pancasila dan juga data lain yang relevan dengan kebutuhan dan tujuan penelitian

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting, yang akan dipelajari, dan muncul kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam penelitian kualitatif proses analisis sejak awal bersamaan dengan proses pengumpulan data dilapangan untuk kemudian dilakukan secara intensif setelah data terkumpul seluruhnya.

Miles & Huberman (1984) (dalam Sugiyono, 2014 : 91), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datannya sudah jenuh. Dalam proses analisis interaktif terdapat 4 komponen harus dipahami oleh peneliti yaitu : (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) display data, dan (4) penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. Pengumpulan Data

Dalam analisis data langkah awal yang dilakukan yaitu peneliti harus mengumpulkan data yang diperoleh sebelum melakukan reduksi. Data yang di kumpulkan bisa data dari lapangan dan teori-teori yang berkaitan dengan tema yang diambil peneliti. Pada penelitian ini, peneliti berusaha untuk mengumpulkan data secara mendetail di SLB Negeri 1 Kota Mataram dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi

2. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Selama pengumpulan data berlangsung, reduksi data dilakukan dengan membuat ringkasan isi dari catatan data yang di peroleh di lapangan. Dalam penyusunan data tersebut peneliti membuat *coding* (kode), memusatkan tema, menentukan batas-batas permasalahan, dan juga menulis memo. Proses reduksi data ini berlangsung sampai laporan akhir penelitian diselesaikan.

3. Display Data (penyajian data)

Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan dengan

kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif.

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi.

Penarikan kesimpulan/verifikasi merupakan kegiatan akhir analisis data, penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada pada penelitian lain.

Pada tahap ini peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya.

Berdasarkan keterangan di atas, maka setiap tahap dalam proses penarikan kesimpulan dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapatkan dari lapangan, hasil wawancara dan didukung dengan studi dokumentasi.